

**PENGARUH PENYALURAN KREDIT UMUM PEDESAAN
TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA, JUMLAH
PENGUSAHA KECIL, TINGKAT INFLASI DI BRI
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan



Diajukan Oleh :

ADITYA WICAKSONO
0911010005/FE/IE

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2013**

USULAN PENELITIAN

PENGARUH PENYALURAN KREDIT UMUM PEDESAAN TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA, JUMLAH PENGUSAHA KECIL, TINGKAT INFLASI DI BRI KABUPATEN SIDOARJO

Yang diajukan

ADITYA WICAKSONO
0911010005

Telah disetujui untuk diseminarkan oleh :

Pembimbing Utama

Drs. Ec. Wiwin Priana, MT
NIP. 1960081010031001

Tanggal :

Mengetahui

Ketua Progdil Ekonomi Pembangunan

Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP
NIP. 196111201987032001

USULAN PENELITIAN

PENGARUH PENYALURAN KREDIT UMUM PEDESAAN TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA, JUMLAH PENGUSAHA KECIL, TINGKAT INFLASI DI BRI KABUPATEN SIDOARJO

Yang diajukan

ADITYA WICKSONO
0911010005

Telah diseminarkan dan disetujui untuk menyusun skripsi oleh :

Pembimbing Utama

Drs. Ec. Wiwin Priana, MT
NIP. 196008101990031001

Tanggal :

Mengetahui

Ketua Progdil Ekonomi Pembangunan

Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP
NIP. 196111201987032001

SKRIPSI

PENGARUH PENYALURAN KREDIT UMUM PEDESAAN TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA, JUMLAH PENGUSAHA KECIL, TINGKAT INFLASI DI BRI KABUPATEN SIDOARJO

Yang diajukan

ADITYA WICAKSONO

0911010005

Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh :

Pembimbing Utama

Drs. Ec. Wiwin Priana, MT
NIP. 196008101990031001

Tanggal :

Mengetahui

A/N Dekan Fakultas Ekonomi

Wakil Dekan I

Drs. Ec. Rachman Suwaidi, MS
NIP. 196003301986031003

SKRIPSI

PENGARUH PENYALURAN KREDIT UMUM PEDESAAN
TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA, JUMLAH
PENGUSAHA KECIL, TINGKAT INFLASI DI BRI
KABUPATEN SIDOARJO

Diajukan Oleh :

ADITYA WICAKSONO
0911010005/FE/IE

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal : 27 September 2013

Pembimbing :
Pembimbing Utama

Tim Penguji :
Ketua

Drs. Ec. Wiwin Priana, MT
NIP. 196008101990031001

Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP
NIP. 196111201987032001

Sekretaris

Drs. Ec. Wiwin Priana, MT
NIP. 196008101990031001

Anggota

Dr. Ririt Iriani Sri Setiawati, SE, ME, AK
NIP. 196502081990022001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM
NIP. 196309241989031001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH PENYALURAN KREDIT UMUM PEDESAAN TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA, JUMLAH PENGUSAHA KECIL, TINGKAT INFLASI DI BRI KABUPATEN SIDOARJO”. Adapun penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Sholawat serta salam selalu tercurah pada qudwah khasanah kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Banyak hambatan yang penulis dapatkan dalam penulisan skripsi ini, namun dengan kerja keras serta tekad besar serta adanya bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak yang penulis sayangi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak RUDY HARTAWAN,SE dan Ibu Ir.PAHLAWANI SRI SUWASTI, Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan, serta doa tulus yang tiada hentinya.
2. Bapak DRS.WIWIN PRIANA,MT Selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga ujian akhir skripsi ini.

3. Bapak DRS.WIWIN PRIANA,MT Selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga ujian akhir skripsi ini.
4. Bapak Dr.Dhani Ichsanudin Nur,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dra. Niniek Imaningsih, Mp selaku ketua program study Ilmu Ekonomi Study Pembangunan.
6. Segenap staf pengajar dan staf kantor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JawaTimur, yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu dan pelayanan akademik bagi penulis.
7. Kedua adik dari penulis ARDIAN TEDHA PRABOWO dan M. SYAM SAVERO, suwun bro .
8. Seluruh keluarga besar SOEWAJIS dan SELAMET MANDOYO yang selalu memberi dukungan dan dorongan kepada penulis.
9. Teman – teman dari BARABAZ, ANT yang tak bisa disebutkan satu persatu, Terima kasih atas semangat serta perhatiannya.
10. Teman-teman seangkatan penulis ADI PUTRA, FERRY F, YANCE S, MEDI SATRIA, FARID AFRIZAL, IRWANTO, MUSTAIN, RENDY H dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih menjadi teman selama kuliah dan selamanya .
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan yang ditemukan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun. Selanjutnya apabila terdapat kesalahan baik dalam materi yang tersaji maupun dalam teknik penyelesaiannya, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan segala kerendahan hati, semoga apa yang terdapat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan.

Sidoarjo, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teori	10
2.2.1 Bank	10
2.2.1.1. Pengertian Bank	10
2.2.1.2. Jenis – Jenis Bank	12
2.2.1.3. Fungsi Dan Tugas Pokok Bank	15
2.2.1.4. Sumber Dana Bank.....	16
2.2.2 Kredit	16
2.2.2.1. Pengertian Kredit	16
2.2.2.2. Tujuan Kredit	18
2.2.2.3. Fungsi Kredit	18
2.2.2.4. Unsur – Unsur Kredit.....	21
2.2.2.5. Macam Dan Jenis Kredit.....	22
2.2.2.6. Prinsip – Prinsip Kredit.....	27
2.2.2.7. Kebijakan KREDIT.....	30

2.2.2.8. Pertimbangan dan Penilaian Dalam Pemberian Kredit.....	33
2.2.2.9. Jaminan dan Kelayakan Kredit.....	35
2.2.3. Pengertian Kredit Umum Pedesaan	37
2.2.4. Kebijakan Kredit Umum Pedesaan.	39
2.2.5. Sasaran Kredit Umum Pedesaan	40
2.2.6. Jenis – Jenis Kredit Umum Pedesaan	43
2.2.7. Syarat – Syarat Calon Nasabah Kredit Umum Pedesaan.....	47
2.2.8. Pemeriksaan Dan Penilaian.....	49
2.2.9. Sumber Dana Kredit Umum Pedesaan.....	51
2.2.10. Prosedur Kredit Umum Pedesaan.....	51
2.2.11. Pendapatan Perkapita.....	52
2.2.12. Pengusaha Kecil.....	53
2.2.13. Definisi Inflasi.....	56
2.2.13.1. Macam – macam Inflasi.....	56
2.3. Kerangka Pikir dan Paradigma	59
2.4. Hipotesis.....	60

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	61
3.2. Teknik Penentuan Sampel.....	62
3.3. Teknik pengumpulan Data.....	62
3.4. Teknik Analisis Dan Uji Hipotesis.....	63
3.4.1. Teknik Analisis.....	63
3.4.2. Uji Hipotesis.....	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian	67
4.1.1. Perkembangan Penyaluran Kredit.....	67
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	69
4.2.1. Perkembangan Pendapatan Perkapita.....	69

4.2.2. Perkembangan Jumlah Pengusaha Kecil.....	71
4.2.3. Perkembangan Tingkat Inflasi.....	72
4.2.4. Perkembangan Penyaluran Kredit Umum Pedesaan.....	73
4.3. Uji Hipotesis Secara Parsial.....	74
4.3.1. Analisis Dan Pengujian Hipotesis.....	74
4.3.2. Pembahasan.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PENGARUH PENYALURAN KREDIT UMUM PEDESAAN TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA, JUMLAH PENGUSAHA KECIL, TINGKAT INFLASI DI BRI KABUPATEN SIDOARJO

Oleh :

ADITYA WICAKSONO

Abstraksi

Dalam upaya untuk mencapai sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan perkreditan diarahkan untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan berusaha para pengusaha kecil dengan menyediakan kredit dalam jumlah yang memadai, tingkat suku bunga yang wajar dan prosedur yang sederhana. Disamping itu kebijakan perkreditan juga diarahkan pada sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja secara berarti.

Tujuan dari Peneliti ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyaluran kredit umum pedesaan terhadap pendapatan perkapita, jumlah pengusaha kecil dan tingkat inflasi penyaluran kredit di BRI kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan data sekunder selama 10 tahun sejak tahun 2003-2012 menggunakan perhitungan analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikan 5% untuk mengetahui hubungan dan pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel Pendapatan Perkapita, Jumlah Pengusaha Kecil, Jumlah Pengusaha Kecil, Inflasi. Terhadap Penyaluran Kredit Umum Pedesaan sebagai variabel bebasnya.

Dari hasil analisis menunjukan bahwa selama periode pengamatan menunjukan bahwa data penelitian normal. Hal ini menunjukan data yang tersedia telah memenuhi syarat menggunakan model persamaan linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial variabel penyaluran kredit menunjukan pengaruh signifikan terhadap jumlah pengusaha kecil dengan hasil perhitungan t-hitung sebesar 2,947, sedangkan terhadap pendapatan per kapita dan tingkat inflasi, penyaluran kredit tidak berpengaruh secara signifikan dengan perhitungan t-hitung sebesar 2,099 untuk pendapatan perkapita dan -1,455 untuk tingkat inflasi

Kata Kunci : Kredit , Pendapatan Perkapita, Pengusaha Kecil, Inflasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis moneter pada awal tahun 1998 mendorong pemerintah dan pelaku ekonomi untuk mendorong adanya kebijakan perkreditan perbankan diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas seera serasi dan seimbang, Dalam upaya untuk mencapai sasaran tersebut kebijakan perkreditan diarahkan untuk mendorong dan tneningkatkan kemarnpuan berusaha para pengusaha kecil dengan menyediakan kredit dalam jumlah yang memadai, tingkat suku bunga yang wajar dan prosedur yang sederhana. Disamping itu kebijakan perkreditan juga diarahkan pada sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja secara berarti.

Sama halnya telah digariskan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara, perbankan harus membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat dan memberikan prioritas dalam pemberian kredit kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Pemberian fasilitas kredit memegang peranan dalam pembangunan nasional khususnya pengusaha kecil.

Era reformasi saat ini, sektor usaha kecil mempunyai peranan yang sangat strategis antara lain karena jumlahnya besar terdapat hampir di semua sektor ekonomi dan daerah, potensi penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi, serta kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan

menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga terjangkau. Peran yang strategis ini membuat pemerintah sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pengusaha kecil yang mengelola sektor usaha ini. Karena diharapkan dengan penyempaan tenaga kerja dapat menekan tingkat pengangguran di Indonesia.

Perbankan sendiri di dalam membantu untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pengusaha kecil dan menengah guna memperluas dan meningkatkan usahanya dalam rangka pengikutsertaan golongan ekonomi lemah dalam ruang lingkup tanggung jawab yang lebih besar dengan jalan mengusahakan kesempatan untuk memperluas permodalannya, meningkatkan keahliannya, dan kesempatan untuk memasarkan hasil produksinya.

Dalam menunjang permodalan pengusaha kecil pemerintah telah menyediakan berbagai pola kredit dengan berbagai fasilitas dan keringanan dalam persyaratannya. Pemerintah melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan berbagai macam kredit pada pengusaha kecil yang berupa antara lain : Kredit Kelayakan Usaha (KKU), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Tani (KUT), dan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES). Hingga saat ini jenis kredit yang paling diminati dan sampai sekarang tetap eksis ialah jenis Kredit Umum Pedesaan atau disingkat KUPeDES. Kebijakan Kredit Umum Pedesaan sendiri mulai dioperasikan sejak awal Februari 1984, berdasarkan SE KPBRINOSE: S.18-INV/1/1984. Tanggal 30 Januari 1984 (Anonim, 2002:I-6).

Kredit Umum Pedesaan yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia kepada pengusaha kecil merupakan dana simpanan dari masyarakat dan disimpan oleh bank yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan kredit untuk melaksanakan kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan. Peningkatan jumlah dan simpanan yang dimiliki bank akan dapat meningkatkan kemampuan bank itu sendiri dalam memberikan fasilitas kredit, demikian pula di kabupaten Sidoarjo melalui Bank Rakyat Indonesia. Data menunjukkan bahwa perkembangan jumlah dana simpanan yang dimiliki Bank Rakyat Indonesia di Sidoarjo mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Jumlah dana simpanan telah terlihat bahwa perkembangan jumlah dana simpanan dalam tahun 2002-2011 mengalami peningkatan.

Sementara jumlah pengusaha kecil di kabupaten Sidoarjo selalu mengalami perubahan yang tidak menentu. Banyaknya jumlah pengusaha kecil tersebut akan mempengaruhi besarnya kredit yang diberikan oleh bank kepada pengusaha kecil. Semakin banyak pengusaha kecil yang mengajukan permohonan kredit maka permintaan kredit akan meningkat dan penyaluran kredit akan meningkat pula.

Tingkat inflasi juga berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Semakin tinggi tingkat inflasi maka harga juga akan cenderung mengalami kenaikan dan penawaran produsen untuk meningkatkan produksinya juga akan semakin meningkat sehingga penyaluran kredit juga akan mengalami

peningkatan pula. Data menunjukkan perkembangan inflasi juga semakin meningkat. (Anonim, 2003: 15)

Dengan adanya faktor-faktor tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan sebagai penirnbangan atas minat pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal dalam mcnjalankan usahanya melalui Kredit Umum Pedesaan dan pengusaha kecil sendiri akan lebih memahami apa saja yang berpengaruh dalam pemberian kredit dan bagairnana proses kredit tersebut dapat diterima sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan diri pengusaha itu sendiri. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi naik turunnya penyaluran Kredit Umum Pedesaan. Namun dalam penelitian ini penulis mencoba mengambil variabel-variabel :pendapatan per kapita, jumlah pengusaha kecil dan tingkat inflasi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas maka dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu :

Apakah variabel penyaluran kredit berpengaruh terhadap pendapatan per kapita, jumlah pengusaha kecil dan tingkat inflasi penyaluran kredit ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran Kredit Umum Pedesaan terhadap pendapatan per kapita, jumlah pengusaha kecil dan tingkat inflasi?
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh penyaluran kredit umum pedesaan terhadap pendapatan perkapita, jumlah pengusaha kecil dan tingkat inflasi ?

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai masukan berharga bagi perbankan untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian melalui penyaluran kredit khususnya Kredit Umum Pedesaan dalam kaitannya dengan kemajuan bagi pengusaha kecil di kabupaten Sidoarjo.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan perbankan khususnya penyaluran kredit bagi pengusaha kecil.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat biasa khususnya para pengusaha kecil yang ingin mengetahui peranan dan perkembangan penyaluran Kredit Umum Pedesaan.

- d. Diharapkan dapat sebagai sumber informasi yang penting bagi kalangan akademis khususnya mahasiswa dan dosen dalam penyusunan skripsi, tesis, dan kertas kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi sebagai dasar untuk melengkapi landasan teori adalah sebagai berikut :

- a. Purwatinigrum (2000:11) dengan mengambil judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Usaha Kecil Di Kabupaten Bojonegoro". Variabel terikat (Y) yang digunakan adalah jumlah KUK yang disalurkan. Sedangkan variabel bebas (X) yang digunakan meliputi: tingkat suku bunga kredit (X_1), tingkat inflasi (X_2), jumlah dana yang dihimpun (X_3), dan jumlah pengusaha kecil (X_4). Hasil penelitian diketahui bahwa variabel bebas yaitu tingkat suku bunga kredit, tingkat inflasi, jumlah dana bank, dan jumlah pengusaha kecil berpengaruh nyata secara simultan dengan variabel terikat. Sedangkan dalam pengujian secara parsial diketahui bahwa tingkat suku bunga, jumlah dana bank, dan jumlah pengusaha kecil berpengaruh nyata terhadap penyaluran kredit sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh secara nyata terhadap penyaluran kredit karena kemungkinan adanya indikasi bahwa kenaikan harga umum tidak mempengaruhi penyaluran kredit.
- b. Kurniasih (2000:9). Dengan mengambil judul "Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Proyek Kredit Mikro Melalui Bank Per-

kreditasi Rakyat Bagi Pengusaha Kecil Di Jawa Timur”. Variabel terikat (Y) yang digunakan adalah jumlah penyaluran kredit. Sedangkan variabel bebas yang digunakan meliputi : tingkat suku bunga kredit (X_1), jumlah tabungan (X_2), dan jumlah pengusaha kecil (X_3). Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel bebas tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap penyaluran kredit, sedangkan secara parsial ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh secara nyata dan positif terhadap penyaluran kredit.

- c. Triastuti (2001:10) dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Kredit Bank Rakyat Indonesia Kepada Pengusaha Kecil di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”. Variabel terikat (Y) yang digunakan adalah jumlah Kredit Usaha Kecil yang disalurkan. Sedangkan variabel X yang digunakan meliputi: tingkat suku bunga kredit (X_1), dana bank (X_2), jumlah pengusaha kecil (X_3), dan pendapatan perkapita (X_4). Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa keempat variabel bebas tersebut berpengaruh secara nyata terhadap jumlah kredit yang disalurkan sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa variabel bebas tingkat suku bunga, dana masyarakat yang dihimpun, jumlah pengusaha kecil dan pendapatan perkapita pengusaha kecil berpengaruh nyata terhadap jumlah kredit yang disalurkan.
- d. Mahestika (2004:11) penelitian dengan judul “Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum Pada Pengusaha Kecil Di Kabupaten Tuban”. Variabel terikat (Y) yang digunakan adalah jumlah

penyaluran kredit sedangkan variabel bebas (X) yang digunakan meliputi: jumlah pengrajin (X_1), suku bunga kredit (X_2), laba pengusaha kecil (X_3), dan tingkat inflasi (X_4). Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ke empat variabel bebas tersebut berpengaruh secara nyata terhadap penyaluran kredit. Sedangkan dalam pengujian secara parsial diketahui bahwa jumlah pengrajin, laba pengusaha kredit dan tingkat inflasi berpengaruh secara nyata terhadap penyaluran kredit sedangkan suku bunga kredit tidak berpengaruh nyata terhadap penyaluran kredit. Hal ini disebabkan naik turunnya suku bunga kredit bagi para pengusaha kecil tidak berpengaruh untuk tetap meminjam dana di bank.

- e. Huda (2002:1) Jumal dengan judul "Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Di Kabupaten Jombang". Variabel terikat (Y) yang digunakan adalah jumlah penyaluran kredit sedangkan variabel bebas (X) yang digunakan meliputi: tingkat suku bunga (X_1), jumlah anggota (X_2) dan PDRB (X_3). Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel diatas berpengaruh secara nyata terhadap kredit yang disalurkan. Sedangkan secara parsial variabel tingkat suku bunga berpengaruh secara nyata terhadap kredit yang disalurkan. Sedangkan jumlah anggota tidak berpengaruh secara nyata karena adanya pemberian kredit yang kurang merata pada anggota (selektif) berkurangnya jumlah anggota dan PDRB tidak berpengaruh secara nyata, karena adanya penurunan pada produksi

nilai barang dan jasa maka pemerintah menunjuk KUD selaku pemberi kredit untuk meningkatkan produksi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Bank

2.2.1.1. Pengertian Bank

Istilah bank berasal dari bahasa Italia "banca", yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang dimana bank memberikan surat atau selemba kertas dalam bentuk rekening Koran, deposito berjangka, dan tabungan serta sebagai pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara didalam lalu lintas pembayaran. (Iswardono, 1999:50).

Menurut Undang-Undang No. 14/1967, "Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang". (Anonim dalam Iswardono, 2000:50). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 7/1992, "Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". (Anonim dalam Nopirin, 2002:191).

Menurut G.M. Stuart dalam bukunya "Bank Politik" mengatakan "Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun dengan uang yang diperolehnya dari prang lain. maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral". (Suyatno, dkk, 2002:1).

Menurut A. Abdurrachman dalam bukunya "Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan" tnenjelaskan bahwa "Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mats uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tetnpat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan (Suyatno, dkk, 1999:1).

Sinungan (2000:3) dalarn bukunya "Manajemen Dana Bank, menjelaskan bahwa Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang menjembatani

masyarakat yang mempunyai kelebihan dana untuk dihimpun dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.2.1.2. Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1967 terdapat berbagai jenis bank. Dalam hal ini dapat dilihat dari fungsinya, dari segi pemilikannya, dan dari segi penciptaan uang giral.

Bank dilihat dari segi fungsinya:

a. Bank Sentral (Central Bank)

Yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang dasar 1945 dan didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13/1968, dimana bank tersebut yang memperoleh hak untuk mengedarkan uang logam maupun uang kertas.

b. Bank Umum (Commercial Bank)

Bank yang dalam usaha pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito serta memberikan kredit jangka pendek.

c. Bank Tabungan (Saving Bank)

Bank yang usaha dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas

berharga. Bank ini baik milik negara, swasta, maupun koperasi.

d. Bank Pembangunan (Development Bank)

Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga dan memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.

e. Bank Desa (Rural Bank)

Bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (hasil pertanian) dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek baik dalam bentuk uang maupun natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

Dilihat dari segi pemilikannya :

a. Bank-Bank Milik Negara

1. Bank Sentral atau Bank Indonesia
2. Bank-Bank Umum Milik Negara :
 - a) Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946)
 - b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - c) Bank Mandiri
 - d) Bank Mutiara
3. Bank Tabungan Negara (BTN)
4. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)

b. Bank-Bank Milik Pemerintah Daerah

Bank-Bank Pembangunan Daerah yang terdapat disetiap daerah tingkat I.

c. Bank-Bank Milik Swasta:

1. Bank-Bank Milik Swasta Nasional
2. Bank-Bank Milik Swasta Asing
3. Kerjasama antara Bank Swasta Nasional dengan Bank Swasta Asing.

d. Bank Koperasi:

1. Bank Umum Koperasi
2. Bank Tabungan Koperasi
3. Bank Pembangunan Koperasi.

Dilihat dari segi penciptaan uang giral :

a. Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral.

1. Bank Sirkulasi (Bank Sentral) yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk- uang kertas bank dan uang giral. 1
2. Bank Umum yang dapat menciptakan uang giral.

b. Bank Sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit.

1. Bank Tabungan
2. Bank-bank lain (Bank Pembangunan dari hipotek) yang tidak menciptakan uang giral. (Suyatno dkk, 1997:15).

2.2.1.3. Fungsi dan Tugas Pokok Bank

Pada dasarnya Bank mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat untuk penitipan atau penyimpanan bank.
- b. Sebagai lembaga pembeli atau penyalur kredit.
- c. Sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran. (Iswardono 1999:50).

Tugas-tugas bank yang lain adalah:

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (financial Investment).
- b. Mempermudah dalam lalu lintas pembayaran uang.
- c. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak dipergunakan, misalnya menghindari resiko hilang, kebakaran, dan lain-lain.
- d. Menciptakan kredit (Created Money Deposit) yaitu cara menciptakan deposit yang sewaktu-waktu dapat atau boleh diuangkan, dari kelebihan cadangan (Excess Reserves). (Iswardono, 1999:62).

2.2.1.4. Sumber Dana Bank

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kedalam masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Dalam usaha menghimpun dana tersebut, sudah barang tentu bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat didalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda pula. Dalam garis besarnya sumber danabagi sebuah bank menurut Suyatno, dkk (1997:30) ada 3 yaitu

- a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas, berbentuk :
 - 1. Giro
 - 2. Dcposito
 - 3. Tabungan
- c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan.

2.2.2. Kredit

2.2.2.1. Pengertian Kredit

Arti semula kata kredit dari kata credere, yang artinya kepercayaan. Kredit artinya penyediaan uang atau barang dan jasa kepada pihak lain, tanpa imbalan secara langsung, tetapi dengan kepercayaan bahwa pihak penerima uang atau barang

terscbut akan mengembalikan hutangnya sesudah jangka waktu tertentu. (Harijanto, 1999:8).

Menurut Undang-Undang Pcrbankan No. 10 tahun 1998 tentang pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disarnakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan. pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentudengan jumlah bunga. imbalan, atau pembagian hasil keuntungan (Munir, 2002:153).

Menurut Sinungan, (1998:12) dalam bukunya "Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit", mengatakan kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan disertai dengan kontra prestasi yang bcrupa bunga.

Raymond P. Kent dalam bukunya "Money and Banking" mengatakan.kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pada waktu diminta yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sckarang. (Suyatno, dkk, 1997:12)

Erick L. Kholer dalam bukunya "A Dictionary For Accountant". Kredit adalah kamampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau pengadaan suatu pinjaman dengan suatu

janji pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati. (Mulyono, 2001:9)

2.2.2.2. Tujuan Kredit

Dalam kehidupan perekonomian modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi. Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengemban sebagai agent of development. adalah sebagai berikut:

- a. Guna menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. (Suyatno,dkk. 1995:15).

2.2.2.3. Fungsi Kredit

Fungsi kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, dan jasa-

jasa akan konsumsi yang kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan tarafhidup manusia.

Adapun fungsi kredit lain dari perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain:

- a. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.

Yaitu para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya selain itu juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan.

- b. Kredit yang meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Yaitu kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giro.

- c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran uang

Yaitu dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Yaitu apabila perekonomian dalam keadaan kurang sehat. kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain: me-ngendalikan peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Yaitu setiap orang dapat selalu ingin meningkatkan usaha tersebut: namun adakalanya dibatasi orang kemampuan di bidang permodalan oleh karena itu bantuan kredit yang diberikan oleh pihak Bank akan dapat mengatasi kekurangan kemampuan pan pengusaha di bidang permodalan, sehingga para pengusaha dapat meningkatkan usahanya.

f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. Yaitu

dengan meningkatkan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja, dengan demikian akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengolahnya diperlukan pula tenaga kerja sehingga pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

g. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan

hubungan internasional. Yaitu bantuan dalam bentuk kredit dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang, tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomis antara

negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional. (Suyatno,dkk, 1995:16).

2.2.2.4. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian tan menyebabkan suatu resiko tertagihnya/macet pemberian

kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut kita kenal dengan nama bunga.(Kasmir, 2000:94)

2.2.2.5. Macam dan Jenis Kredit

Bila dilihat dari pengertian kredit maka pengertian dasarnya kredit hanya satu macam.akan tetapi bila kredit dilihat menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada didalam pengertian kredit, maka kriteria kredit dapat dibedakan berdasarkan:

1. Kredit menurut penggunaannya

a. Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang dipergunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi seperti pemenuhan kepuasan rumah tangga, perbaikan rumah, pembelian alat-alat rumah tangga dan lain-lainnya.

b. Kredit Produktif

Yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang menghasilkan.Dalam kegiatannya kredit tersebut dipergunakan untuk membelanjai usaha-usaha yang

menimbulkan atau meningkatkan faedah-faedah seperti faedah bentuk, waktu, tempat atau pemilikan.

Kredit produktif terdiri dari :

- 1) Kredit investasi yang diperuntukkan membelanjai perolehan atau pengembangan barang-barang modal atau aktiva tahan lama, semisal tanah, bangunan, alat-alat bent dan sebagainya.
- 2) Kredit modal kerja dipenaaruhi untuk membelanjai modal lancar yang biasanya satu waktu beberapa proses produksi.
- 3) Kredit likuiditas, kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia yang tidak bertujuan konsumtif tetapi tidak juga bertujuan produktif.

2. Kredit menurut jangka waktunya

Menurut jangka waktu kredit di Indonesia disesuaikan dengan pengertian menurut pengaturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu pelunasan setinggi-tingginya 1 (satu) tahun. Biasanya Bank memberikan kredit ini sebagai kredit modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Yaitu kredit dengan jangka waktu pelunasan 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Kredit yang disalurkan oleh bank untuk keperluan modal kerja permanen atau investasi yang jumlahnya relatif kecil.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang biasanya berumur maksimum lebih dari 3 (tiga) tahun, misalnya kredit investasi.

3. Kredit menurut cara penarikannya dan pembayaran kembaliannya

a. Kredit sekaligus

Yaitu kredit yang dananya disediakan untuk ditarik oleh debitur dengan sekaligus, baik diambil tunai maupun dengan cara pemindah bukuan.

b. Kredit dengan jaminan

Jenis kredit seperti inilah yang dipergunakan oleh seluruh Bank Indonesia sesuai dengan larangan Bank Indonesia tentang pemberian kredit tanpa jaminan, jadi disamping keyakinan tentang prospek usaha nasabah yang tercermin dari kekuatan keuangan sekarang dan proyeksinya di masa yang akan datang, juga harus dinilai bahwa jaminan yang tersedia menyakinkan Bank. (Suyatno dkk, 1995:25).

4. Kredit menurut lembaga pemberi-penerima kredit

Berdasarkan kriteria ini dapat dibedakan menjadi tiga macam kredit, yaitu:

- a. Kredit Perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha atau konsumsi.

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank swasta atau bank pemerintah kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan pembiayaan dan atau kredit dari bank kepada individu atau kelompok untuk membiayai pembelian barang-barang konsumsi tahan lama secara angsuran. Kredit perbankan pada dunia usaha dapat dibedakan menjadi :

- 1) Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan yang melakukan investasi atau penanaman modal yang meliputi pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi dan ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin yang semua itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas.
- 2) Kredit Eksploitasi, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk

membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.

b. Kredit Likuiditas

Yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia (Bank Sentral) kepada bank-bank swasta dan bank-bank pemerintah yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai perkreditan. Kredit Likuiditas ada dua macam:

- 1) Kredit Likuiditas Darurat, yaitu kredit likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank apabila merekamengalami kesulitan likuiditas dalam operasinya sebagai akibat dari perubahan yang mendariak di luar kekuasaan bank (faktor ekstem).
- 2) Kredit Likuiditas Khusus, yaitu kredit likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia apabila mereka tnengalami kesulitan likuiditas karena faktor-faktor intern.

c. Kredit Langsung

Yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada pihak ketiga bukan bank, seperti Pertamina, Perum Peruri, Pupuk Kalimantan dan Ditjen Tanaman Pangan untuk pembukaan lahan baru di daerah transmigasi.(Wijaya, 1992:154).

2.2.2.6. Prinsip-Prinsip Kredit

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, maka dikenal adanya 5 (lima) prinsip perkreditan, yaitu:

a. Character

Adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif, kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang character dari calon debitur dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut:

1. Meneliti daftar riwayat hidup calon debitur.
2. Meneliti reputasi calon debitur dilingkungan usahanya.
3. Memintakan bank to bank informasi ke bank lain sebanyak-banyaknya.
4. Memintakan informasi kepada Asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah tersebut bergabung
5. Dan upaya-upaya lainnya yang dianggap perlu.

b. Capacity

Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuannya melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan

usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Pengukuran Capacity dari calon debitur ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain:

1. Pendekatan Historis

Dengan menilai past performance dari nasabah yang bersangkutan apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau selalu menunjukkan perkembangan yang semakin maju dari waktu ke waktu.

2. Pendekatan Finansial

Dengan menilai posisi neraca dan laporan rugi / laba untuk beberapa periode terakhir yaitu untuk mengetahui seberapa besarnya solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas serta tingkat resiko usahanya.

3. Pendekatan Edukasional

Dengan menilai latar belakang pendidikan para pengurus perusahaan calon debitur, hal ini penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki kemampuan teknologi tinggi ataupun usaha-usaha yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti Rumah Sakit, Biro Konsultan, dan lain-lain.

4. Pendekatan Yuridis

Menilai apakah calon debitur tersebut secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya atau badan

usaha yang diwakilinya untuk mengadakan ikatan perjanjian kredit dengan bank.

5. Pendekatan Manajerial

Menilai sampai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan nasabah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

6. Pendekatan Teknis

Menilai sampai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi, sampai kepada kemampuan dalam merebut market share.

c. Capital

Jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin kaya seseorang, ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit sebab seorang debitur yang telah menanamkan dananya dalam proporsi yang besar dibandingkan dengan kredit yang diperolehnya dari bank tertentu akan melakukan usahanya dengan penuh dan biasanya berhasil. Kemampuan modal sendiri akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah terkena goncangan dari luar dan justru terjadi sebaliknya bagi calon debitur yang tidak memiliki modal sendiri yang besar.

d. Colateral

Barang-barang jaminan yang diserahkan oleh penjamin debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya, sebagai pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan Kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.

e. Condition of Economy

Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. (Mulyono, 2001:11).

2.2.2.7. Kebijakan Perkreditan

Berbicara soal perkreditan sebetulnya tidak dapat melepaskan dari masalah-masalah yang ada dalam suatu kegiatan perbankan, secara minimal suatu bank dapat memberikan kredit kalau ia mempunyai dana yang mencukupi.

Dalam perkembangan business perbankan yang mengarah kepada "One Stop Shopping Bank" maka permasalahannya akan semakin rumit, karena perkreditan itu

sendiri akan saling terkait dengan kegiatan perbankan lainnya dan akan membentuk "Net Work" yang tidak putus-putusnya. Untuk mengatasi berbagai kerumitan serta dalam upaya agar kegiatan perkreditan itu berjalan dengan lancar, maka diperlukan suatu kebijaksanaan kredit. Karena kebijaksanaan ini akan merupakan pedoman kerja di bidang perkreditan maka kebijaksanaan tersebut harus mengandung keputusan-keputusan politis, keputusan yang bersifat teknis operasional.

Dalam menetapkan kebijaksanaan perkreditan terdapat 3 (tiga) asas pokok yang harus diperhatikan :

a. Asas Likuiditas

Suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari nasabahnya atau dari masyarakat luas.

Suatu bank dikatakan likuid apabila memenuhi beberapa kriteria antara lain :

1. Bank tersebut memiliki Cash Asset sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
2. Bank tersebut memiliki aset lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.

3. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash asset baru melalui berbagai bentuk utang.

b. Asas Solvabilitas

Usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit. Dalam kebijaksanaan perkreditan maka bank harus pandai-pandai mengatur penanaman dana ini baik pada bidang perkreditan, surat-surat berharga pada suatu tingkat resiko kegagalan yang sekecil mungkin. Sebab asset bank dalam bentuk kredit dan penanaman dalam surat-surat berharga ini akan merupakan sumber utama bagi bank untuk menutup segala utang bank kepada para girant / deposan apabila sewaktu-waktu yang bersangkutan akan menarik dananya dari bank tersebut.

c. Asas Rentabilitas

Sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan akan memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya. Laba yang diperoleh dari perkreditan berupa selisih antara biaya danadengan pendapatan bunga yang diterima dari para debitur. (Mulyono, 2001:19).

2.2.2.8. Pertimbangan dan Penilaian Dalam Pemberian Kredit

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. (Anonim dalam Munir, 2002:180)

Maksud dari pasal tersebut bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. (Suyatno,dkk, 1997:138).

Menurut Sinungan (1993:241), bahwa untuk menentukan nilai kredit, digunakan beberapa formulasi. Formula yang sudah lazim digunakan adalah 4P, yaitu :

- a. Personality, yaitu Bank mencari data tentang kepribadian debitur seperti kelahiran, pendidikan, pekerjaan, hobi, dan lain-lain.

- b. Purpose, yaitu Bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah untuk berdagang, memproduksi, atau sebagainya.
- c. Prospect, yaitu harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha debitur.
- d. Payment, yaitu untuk mengetahui bagaimana pembayaran kembali keedit yang akan diberikan.

Ada beberapa faktor penting dalam mempengaruhi penilaian kredit yang sering disebut 5 C, yaitu :

a. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit betul-betul dapat dipercaya.

b. Capacity

Unyuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

c. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, laporan keuangan (Rana dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari serta likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

d. Condition (Keadaan)

Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. Colateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berupa fisik maupun non fisik. (Kasmir, 2000:105).

2.2.2.9. Jaminan Dan Kelayakan kredit

Bagi bank, jaminan kredit merupakan sumber kedua pembayaran kembali kredit dan bunga yang tertunggak. Sumber pertama pembayaran kembali kredit adalah dana intern perusahaan terutama keuntungan dan dana penyusutan. Bila debitur gagal memenuhi kewajibannya kepada bank dari sumber pembayaran pertama, maka harta mereka yang dijamin akan dipergunakan sebagaiantinya. (Sutojo, 1995:155).

Fungsi utama jaminan adalah memperkecil jumlah kerugian yang di derita bank, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan kredit dapat berupa harta fisik (tanah, gedung, mesin, peralatan, kendaraan, persediaan bahan dan sebagainya), jaminan pembayaran oleh pihak ketiga (misalnya para pemegang saham perusahaan, perusahaan induk) maupun

dalam bentuk gadai saham (pledge of share). Bilamana debitur mampu atau tidak mau membayar kembali Kredit, maka harta fisik yang dijamin atau saham yang digadaikan akan disita dan dijual lelang untuk melunasi kredit. (Sutojo, 1995:48).

Bank akan meluluskan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur tergantung dari hasil pertimbangan berikut ini :

a. Faktor intern bank

Sebelum mengambil keputusan untuk meluluskan permintaan kredit (terutama dalam jumlah besar) terlebih dahulu bank akan memeriksa kondisi intern operasi dan keuangan dewasa ini, dua tiga terakhir, serta prospek masa depan.

b. Kredibilitas

Bank akan lebih bersemangat dalam bekerjasama dengan investor, apabila mitra usaha mereka dapat menunjukkan kemampuan mengelola proyek yang akan dibangun dengan baik. Untuk membuktikan kemampuan tersebut, kredibilitas investor sebagai pengusaha maupun calon pengelola proyek, memegang peranan penting. Investor harus dapat membuktikan bahwa mereka adalah pengusaha yang berhasil dan dapat memenuhi harapan bank dalam menjalankan proyek yang dimintakan kredit.

c. Prospek masa depan

proyek Masa depan sebuah proyek dapat diharapkan akan cerah, bila proyek tersebut dapat memenuhi kriteria berikut ini :

1. Dikelola oleh manajemen yang profesional
2. Didukung oleh sumber daya manusia yang dapat menjalankan operasi proyek dengan baik.
3. Dapat memproduksi barang atau jasa yang kompetitif.
4. Dapat memasarkan hasil produksi tersebut secara menguntungkan.
5. Dapat menghasilkan keuntungan yang layak. (Sutojo, 1995:190).

2.2.3. Pengertian Kredit Umum Pedesaan

Dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.62-DIR/ADK/09/2001, tanggal 18 September 2001, tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) yang dimaksud dengan Kredit Umum Pedesaan adalah fasilitas kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (eligible). (Anonim, 2002:11-2)

Sebagai kredit skala mikro, prosedur Kredit Umum Pedesaan sangat mudah dan sederhana, namun dalam penyalurannya

perlu pemahaman secara tepat dari pejabat kredit lini yang menyangkut kebijakan, sifat dan prinsip-prinsip dasar pemberian kredit Urnum Pedesaan yaitu:

1. Umum, artinya Kredit Umum Pedesaan dapat diberikan kepada siapa saja, dalam arti tidak dibatasi dalam sektor ekonomi tertentu, keanggotaan tertentu, kelompok masyarakat tertentu, sepanjang calon nasabah yang bersangkutan telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Individual, artinya pemberian Kredit Umum Pedesaan dilakukan dengan melalui pendekatan secara individual dan kasus per kasus, bukan berbentuk paket (massal).
3. Selektif, artinya pemberian Kredit Umum Pedesaan dilaksanakan secara selektif kepada nasabah yang usahanya dinilai layak dan keputusan kredit harus sesuai dengan pertimbangan bank teknis. Usaha layak yakni usaha yang mempunyai prospek bagus untuk dikembangkan dan kegiatannya tidak bertentangan dengan perundang-undangan, moral agama dan adat-istiadat masyarakat setempat, serta tidak merusak lingkungan hidup.
4. Bisnis, artinya keputusan akhir atas suatu permohonan Kredit Umum Pedesaan ditentukan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit sesuai dengan pertimbangan bank teknis (sound banking consideration). (Anonim, 2002:11-2)

Adapun ketentuan besarnya plafond Kredit Umum Pedesaan ditetapkan minimal Rp.50.000,00 sampai maksimum Rp.50.000.000,00. Baik untuk Kredit Umum Pedesaan Modal Kerja atau Kredit Umum Pedesaan Investasi. Sehingga kepada seorang nasabah, selain dapat diberikan fasilitas Kredit Umum Pedesaan Modal Kerja, juga dapat diberikan fasilitas Kredit Umum Pedesaan Investasi dalam waktu yang bersamaan, sepanjang kedua jenis Kredit Umum Pedesaan tersebut jumlah akumulatifnya tidak melebihi ketentuan maksimum yakni Rp 50.000.000,00. (Anonim, 1991:III-C.1)

2.2.4. Kebijakan Kredit Umum Pedesaan

- a. Kredit diberikan perorangan atau perusahaan yang usahanya dinilai layak (eligible) untuk dibiayai dengan Kredit Umum Pedesaan. Keputusan akhir atas suatu permohonan kredit, ditentukan oleh bank sesuai dengan pertimbangan bank teknis (Sound Banking Consideration).
- b. Ekspansi kredit dilaksanakan apabila didukung oleh dana dan tenaga staf Bank Rakyat Indonesia Unit yang cukup guna pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan bagi :
 1. Nasabah lama yang dinilai layak (eligible) dengan melalui peningkatan plafond kreditnya.
 2. Nasabah bank yang dinilai layak (eligible) terutama dengan cara melakukan pendekatan sistematis, yaitu pencarian nasabah

bank melalui jaringan bisnis, disamping pencarian nasabah secara door to door.

- c. Kredit tidak dapat diberikan untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan Ketentuan atau Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang yang menyangkut dampak lingkungan, misalnya kepada usaha-usaha yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup atau bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku (perjudian, mucikari, dan lainnya).
- d. Ketentuan suku bunga kredit ditetapkan sedemikian rupa dengan dasar pertimbangan untuk dapat menutup seluruh pembiayaan, termasuk biaya dana yang tidak di subsidi, biaya operasional, dan biaya resiko kredit, serta menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menjaga kelangsungan dan pengembangan kegiatan Bank Rakyat Indonesia Unit. (Anonim, 1991:11.1).

2.2.5. Sasaran Kredit Umum Pedesaan

Dalam pemberian Kredit Umum pedesaan ada dua golongan masyarakat yang dijadikan sasaran, yaitu:

1. Golongan Pengusaha

Yaitu semua pengusaha warga negara Indonesia yang bergerak di berbagai sektor ekonomi yang ada dalam wilayah kerja Bank Rakyat Indonesia Unit, seperti sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa lainnya. (Anonim, 1991:111-A-1.1).

2. Golongan Masyarakat Berpenghasilan Tetap

Yang dimaksud dengan Golongan Masyarakat Berpenghasilan Tetap adalah:

a. Semua pegawai negeri yang dimaksudkan Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 1974 Bab 1 pasal 1. pegawai negeri yang dimaksud adalah :

- 1) Pegawai negeri sipil (baik pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah, maupun pegawai negeri sipil lainnya yang ditetapkan/ diangkat atas dasar peraturan pemerintah PGPG-1968 dengan pangkat III/d kebawah dari bukan pejabat).
- 2) Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan pangkat Pembantu Letnan I kebawah dan bukan pejabat.
- 3) Pegawai Badan Usaha Milik Negara (kecuali pegawai Bank Rakyat Indonesia / Bank Rakyat Indonesia Unit) dan bukan pejabat.
- 4) Pegawai Perusahaan Daerah dan bukan pejabat. Menurut PP. No 6 tahun 1974 serta SK Mendagri No. 82 tahun 1984 tentang Struktur Organisasi Kecamatan, maka yang diartikan dengan pejabat disini adalah:
 - a) Di tingkat pusat ; menduduki jabatan eselon III keatas.

- b) Di tingkat Propinsi/ Daerah Istimewa ; Gubernur dan jabatan eselon II keatas baik dari jawatan otonom maupun jawatan pusat.
 - c) Di tingkat Kabupaten/ Kodya ; Bupati/ walikota dan jabatan eselon II keatas baik dari jawatan otonom maupun jawatan pusat.
 - d) Di tingkat kecamatan ; Camat, Sekwikam, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e) Di lingkungan Perusahaan Jawatan Negara, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan, Perusahaan Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang, baik milik negara atau Perusahaan daerah yang tingkatnya ditetapkan oleh Menteri yang membawahnya.
- b. Pensiunan dari Golongan masyarakat berpenghasilan tetap yang tidak mempunyai usaha.
 - c. Pegawai tetap dari perusahaan swasta yang bonafid (Anonim, 1999:III-A.2.1).

Perlu ditegaskan bahwa sejak dikeluarkannya surat edaran KANPUS BM NOSE: S.212-DIR/8/1986 tanggal 14 Agustus 1986, maka yang dapat diberikan fasilitas Kredit Umum Pedesaan tidak hanya golongan pengusaha pribumi saja, tetapi golongan non pribumi Dengan kata lain, Kredit Umum Pedesaan dapat diberikan kepada setiap warga

negara Indonesia tanpa membedakan agama, asal dan status atau suku bangsanya. (Anonim, 1991 : III -A-I.1).

2.2.6. Jenis-Jenis Kredit Umum Pedesaan

Berdasarkan penggunaannya, Kredit Umum Pedesaan dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu :

a. Kredit Umum Pedesaan Modal Kerja (Eksplorasi)

Kredit Unnun Pedesaan Modal Kerja diberikan kepada pengusaha sebagai tambahan dana atau pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan modal kerja usahanya atati untuk membiayai keperluan konsumtif maupun non konsumtif (produktif) bagi golongan masyarakat berpenghasilan tetap. Adapun sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan Kredit Unnun Pedesaan Modal Kerja adalah sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian

Yakni untuk membiayai semua jenis kegiatan yang sangat tergantung dan menunjang pada hasil usaha bercocok tanam seperti pengecer pupuk atau obat-obatan, pengusaha kecil yang mengumpulkan segala hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau, perkebunan dan memasarkan kembali dengan atau tanpa proses lebih lanjut.

2. Sektor Perindustrian

Yakni untuk membiayai pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi, pengolahan barang setengah jadi menjadi barang jadi. Yang dimaksud bahan mentah disini adalah bahan mentah yang tidak berasal dari hasil pertanian seperti diatas.

3. Sektor Perdagangan

Yakni untuk membiayai pembelian dan penjualan atau pemasaran barang dagangan, misalnya perdagangan sembilan bahan pokok (sembako), bahan pokok keperluan sehari-hari, material bangunan, batik atau kain, minyak tanah dan lain sebagainya. Dalam hal ini tidak termasuk pembelian dari penjualan atau pemasaran hasil langsung pada sektor pertanian.

4. Sektor Jasa lainnya

Yakni untuk pembiayaan usaha yang bersifat pelayanan jasa kepada umum. Misalnya perbengkelan, salon, penjahit, dan lain sebagainya.

5. Sektor Golongan Masyarakat Berpenghasilan Tetap

Yaitu Kredit Umum Pedesaan yang dipergunakan untuk pembiayaan yang habis terpakai, yang bukan merupakan pembelian harta berwujud. Pembiayaan tersebut semata-mata hanya merupakan Maya, dan tidak menghasilkan sesuatu yang berbentuk fisik. Kredit Umum Pedesaan sektor golongan

masyarakat berpenghasilan tetap dibagi menjadi dua golongan yaitu:

a) Kredit Umum Pedesaan golongan masyarakat berpenghasilan tetap yang bersifat konsumtif, yaitu Kredit Umum Pedesaan yang dipergunakan untuk pembiayaan yang habis dipakai, yang tidak secara langsung memberikan dampak perbaikan taraf hidup si peminjam, misalnya sebagai berikut :

- 1) Biaya pesta perkawinan
- 2) Biaya khitanan
- 3) Biaya rumah sakit pengobatan
- 4) Dan lain sebagainya.

b) Kredit Umum Pedesaan golongan masyarakat berpenghasilan tetap yang bersifat non konsumtif, yaitu Kredit Umum Pedesaan yang dipergunakan untuk pembiayaan keperluan yang dapat menunjang dan menaikkan taraf hidup si peminjam, antara lain :

- 1) Biaya perbaikan rumah
- 2) Biaya Perbaikan kendaraan bermotor
- 3) Biaya sekolah / kuliah
- 4) Dan lain-lain

b. Kredit Umum Pedesaan Investasi

Kredit Umum Pedesaan ini diberikan kepada pengusaha untuk pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana atau peralatan

produksi. Sedang bagi golongan masyarakat berpenghasilan tetap, kredit tersebut dapat dipergunakan untuk pembelian atau pembangunan pembelian kendaraan bermotor dan lain sebagainya yang bersifat produktif. Adapun sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan Kredit Umum Pedesaan Inyestasi tersebut adalah:

1. Sektor Penanian

Yakni untuk pembelian alat-alat pertanian, seperti bajak atau traktor, alat perontok padi (tresser hold), alat sortasi hasil panen kedele, mesin parut kelapa, pembuatan gudang dan lantai jemuran. pembelian bibit tanaman keras (yang tidak habis dalam satu kalipanen, misal bibit jeruk, karet, kelapa, teh dll) atau untuk pembelian bibit ayam pedaging, sapi perah dan lain sebagainya.

2. Sektor Perindustrian

Misalnya untuk pembiayaan pengadaan alat-alat produksi (mesin jahit, Tungku pembakaran gamping dan sebagainya), pembangunan atau perbaikan bangunan pabrik, tempat usaha dan lainnya, sepanjang tujuan utamanya bukan untuk mengolah hasil langsung pertanian.

3. Sektor Perdagangan

Misalnya untuk pembiayaan pembelian alat-alat berjualan, pembangunan, perbaikan atau perluasan tempat berjualan atau gudang dan lainnya yang tidak bertujuan untuk memperdagangkan hasil langsung pertanian sebagai yang paling dominan.

4. Sektor Jasa lainnya

Misalnya untuk pembiayaan pembelian alat-alat perbengkelan, mesin jahit, salon, pembelian kendaraan angkutan dan lainnya

5. Sektor Golongan Masyarakat Berpenghasilan Tetap

Dilihat dari tujuan penggunaannya, maka jenis Kredit Umum Pedesaan Investasi bagi golongan masyarakat berpenghasilan tetap, diberikan untuk tujuan yang bersifat non konsumtif, yaitu yang dipergunakan untuk pembelian barang-barang berwujud yang fisiknya dapat dilihat secara nyata, misalnya:

- a) Pembelian kendaraan bermotor
- b) Pembangunan / pembelian rumah
- c) Pembelian tanah
- d) Pembelian peralatan kerja
- e) Pembelian perabot rumah tangga (misal ; TV, radio, kulkas, kursi, lewari, tempat tidur dll). (Anonim, 1997:IV-A-2.1)

2.2.7. Syarat-Syarat Calon Nasabah Kredit Umum Pedesaan

a. Golongan Pengusaha

Untuk calon nasabah Kredit Umum Pedesaan dari golongan pengusaha, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :

1. Penduduk yang berdomisili di wilayah kerja Bank Rakyat Indonesia Unit setempat yang dibuktikan dengan keterangan sebagai penduduk desa dari Kepala Desa / Lurah atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2. Berkarakter baik dan mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dengan Kredit Umum Pedesaan.
 3. Untuk Kredit Umum Pedesaan dengan plafond tertentu cukup menggunakan surat keterangan usaha dari Kepala Desa / Lurah.
 4. Untuk nasabah yang sudah mempunyai ijin usaha, cukup menyerahkan copy surat ijin usaha tersebut.
 5. Tidak sedang menikmati kredit lain di kantor cabang Bank Rakyat Indonesia atau di Bank Rakyat Indonesia Unit lain.
 6. Dapat menyediakan agunan kebendaan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
 7. Bersedia untuk membuka rekening tabungan di Bank Rakyat Indonesia Unit yang bersangkutan. (Anonim, 1997:IV-A-4.I).
- b. Golongan Masyarakat Berpenghasilan Tetap
- Untuk golongan masyarakat berpenghasilan tetap persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:
1. Domisili kantor atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja Bank Rakyat Indonesia Unit yang bersangkutan.
 2. Tidak sedang menikmati kredit di Kantor Cabang atau Bank Rakyat Indonesia Unit lainnya.
 3. Menyerahkan asli Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai tetap yang pertama dan asli SK penetapan pangkat pegawai yang

terakhir atau asli Surat Keputusan pensiun bagi yang berstatus pensiunan.

4. Menyerahkan asli kartu peserta Taspen (bagi pegawai negeri), atau kartu peserta ASABRI bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau kartu identitas pensiun bagi para pensituran dan asli Kartu Pegawai (KARPEG) untuk pegawai negeri sipil.
5. Bersedia. untuk membuka rekening tabungan di Bank Rakyat Indonesia Unit yang bersangkutan. (Anonim, I 997:IV-A-4.2).

2.2.8. Pemeriksaan Dan Penilaian

Kredit Umum Pedesaan Pada umumnya ruang lingkup pemeriksaan dan penilaian terhadap usaha calon nasabah diarahkan pada beberapa aspek sebagai berikut :

a. Aspek Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu kunci keberhasilan dari suatu usaha sehingga dapat memperoleh laba yang menjamin kelangsungan hidup usaha itu. Umumnya penilaian atau analisa pemasaran mencakup hal-hal berikut :

1. Keadaan pemasaran saat ini..
2. Prospek pemasaran dimasa yang akan datang.
3. Faktor-faktor yang menunjang pemasaran.

b. Aspek Teknis

Penilaian secara teknis mencakup masalah proses produksi, kebutuhan teknis dari usaha, sifat dari alat-alat produksi, lokasi proyek dan sebagainya.

Tujuan penilaian aspek teknis adalah untuk mengetahui sampai dimana kemampuan teknis suatu usaha dalam merealisasikan rencana keda atau proyeknya.

c. Aspek Manajemen

Penilaian mengenai segi manajemen adalah untuk mengetahui kemampuan, pengalaman, kejujuran dan cara mengelola usaha dalam segenap karyawannya.

d. Aspek Keuangan

Penilaian aspek keuangan usaha dapat diketahui dari hasil operasi masa keadaan keuangan masa kini dan prospek usaha di masa mendatang.

Tujuan daripada pemeriksaan dan penilaian terhadap aspek keuangan usaha nasabah adalah untuk mengukur sejauh mana kesehatan usaha dan seberapa besar fasilitas Kredit Umum Pedesaan yang dapat diberikan.

e. Aspek Hukum

Penilaian mengenai aspek hukum perusahaan atau usaha dapat di peroleh dari akta pendirian usaha atau surat ijin usaha dari instansi yang berwenang. Begitu pula mengenai jaminan, harus kepemilikannya atau penguasaannya.

f. Aspek Sosial Ekonomi

Penilaian atas aspek sosial ekonomi adalah yang berkenaan dengan dampak usaha atau proyek tersebut terhadap keadaan sosial masyarakat setempat khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. (Anonim. 2002:111-13-7)

2.2.9. Sumber Dana Kredit Umum Pedesaan

Sumber dana Kredit Umum Pedesaan berasal dari:

1. Dana pemerintah berupa penyertaan modal
2. Dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Rakyat Indonesia Unit.
3. Dana Bank Indonesia berupa kredit likuiditas yang disediakan untuk Kredit Umum Pedesaan.
4. Dana dari saldo laba tahun berjalan.
5. Dana dari akumulasi cadangan - cadangan yang dibentuk oleh Bank Rakyat Indonesia Unit.
6. Dana luar negeri, yaitu bantuan Bank Dunia dan Bank Export Import Jepang. (Anonim, 1991 :111-11-1).

2.2.10. Prosedur Kredit Umum Pedesaan

Ada beberapa tahap dalam prosedur Kredit Umum Pedesaan yaitu:

- a. Tahap pendaftaran permohonan Kredit Umum Pedesaan:
 1. Administrasi saat pelayanan pendaftaran

2. Administrasi setelah pelayanan pendaftaran
 - b. Tahap pemeriksaan calon nasabah Kredit Umum Pedesaan ditempat.
 1. Pemeriksaan terhadap aspek-aspek usaha calon nasabah.
 2. Pemeriksaan jaminan calon nasabah Kredit Umum Pedesaan.
 - c. Tahap usulan keputusan pinjaman Kredit Umum Pedesaan.
 - d. Tahap putusan Kredit Umum Pedesaan.
 - e. Tahap realisasi Kredit Umum Pedesaan. (Anonim, 1991:1V-A-1).

2.2.11. Pendapatan Perkapita

Pengertian Pendapatan per kapita adalah jumlah (nilai) barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. (Eko Yuli, 2009)

Sebagai lembaga keuangan, bank jelas mempunyai pendapatan per kapita yang berasal dari aktivitas yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan seperti dana yang didapat berasal dari bunga yang didapat dari hasil bunga penyaluran kredit yang dilakukan bank tersebut. Makin banyak hasil yang didapat oleh bank kemudian juga sangat berpengaruh pada likuiditas bank atau kesehatan dan bank itu sendiri. Semakin bagus likuiditas bank tersebut makin bagus juga pendapatan perkapita yang diperoleh oleh bank itu sendiri.

Dengan peyaluran kredit ini, maka bank memperoleh keuntungan dan besarnya pendapatan perkapita yang diperoleh berdasarkan dana yang diperoleh oleh bank tersebut, yang tak lain dana itu berasal dari

bunga yang didapat dari penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank tersebut. Apabila hal ini dapat terus berkembang maka bank dapat memperoleh banyak keuntungan, seperti dana yang melimpah, nama yang baik, dan juga kepercayaan yang baik dari masyarakat karena telah menjadi bank yang dapat diandalkan. Sehingga bank dapat lebih mengembangkan program dan juga tujuan menuju yang lebih baik lagi. Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kredit adalah penyediaan dana bagi peminjam yang bersifat menyediakan suatu modal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. (Boediono, 2001)

2.2.12. Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil adalah orang/sekelompok orang yang menjalankan usahanya dalam skala kecil. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 9/1995 tentang usaha yaitu " Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang".(Anonim dalam Glendoh,2001:1).

Undang-Undang No. 9/1995 dirumuskan persyaratan atau kriteria untuk dapat digolongkan dalam usaha kecil. Isi lengkap dari pasal 5 ayat dan 2 Undang-Undang No. 9/1995 adalah sebagai berikut :

a. Kriteria usaha kecil sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00(Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
3. Milik Warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
5. Berbentuk usaha orang atau perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum.

b. Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan pemerintah.(Anomim dalam Glendoh,2001:3).

Menurut hasil seminar yang diadakan Koperasi Wilayah VII pada tahun 1991, dari makalah yang dibahas, dapat diambil pernyataan bahwa usaha kecil dalam arti luas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Industri ini adalah industri berskala kecil, baik dalam ukuran modal, jumlah produksi maupun jumlah tenaga kerjanya.)

2. Perolehan modal umumnya berasal dari sumber tidak resmi seperti tabungan keluarga, pinjaman dari kerabat, dan mungkin dari "lintah darat".
3. Karena skala kecil, maka sifat pengelolaannya terpusat, demikian pula pengambilan keputusan tanpa atau dengan sedikit pendelegasian fungsi dalam bidang-bidang pemasaran, keuangan, produksi dan sebagainya.
4. Tenaga kerja yang ada umumnya terdiri dari anggota keluarga atau kerabat dekat.
5. Hubungan antara keterampilan teknis dan keahlian dalam pengelolaan usaha industri kecil ini dengan pendidikan formal yang dimiliki para pekerja umumnya lemah.
6. Peralatan yang digunakan sangat sederhana dengan kapasitas output yang rendah. (Anonim dalam Glendoh, 2001:1).

Berbagai hal yang diuraikan diatas merupakan ciri-ciri yang melekat dalam diri struktur usaha kecil. Dari berbagai masalah yang dihadapi nampaknya masalah permodalan, manajemen, dan keterampilan sumber daya manusia masih menjadi persoalan yang selalu menghantui sektor usaha kecil walaupun tak dapat dipungkiri bahwa sektor usaha kecil memiliki kemampuan adaptif dan dinamis terhadap perubahan selama didukung oleh aspek lainnya.

Sektor usaha kecil mempunyai kemampuan beradaptasi yang sangat besar, penggunaan biaya over head pun sangat kecil

dibandingkan usaha skala besar, dan tidak kalah pentingnya usaha kecil mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar serta sangat cekatan dalam memasuki celah-celah pasar yang tidak dijangkau oleh produk perusahaan besar.

2.2.13. Definisi Inflasi

Menurut Boediono (2001 : 161), Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan). Sebagian besar dari harga barang-barang lain. Sedangkan menurut Nopirin (1993:25), Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus.

2.2.13.1. Macam-macam Inflasi

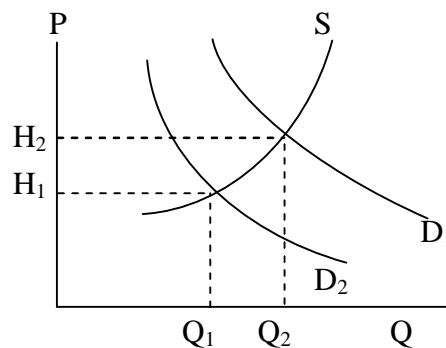
Menurut Boediono (2001 : 162) terdapat tiga penggolongan inflasi antara lain :

1. Penggolongan inflasi berdasarkan parah tidaknya, dapat dibedakan:
 - a. Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)
 - b. inflasi sedang (antara 10%-30%setahun)
 - c. Inflasi berat (antara 30%-100% setahun)
 - d. Hiper inflasi (diatas 100% setahun)
2. Berdasarkan atas sumber penyebabnya, inflasi dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Demand Pull Inflation

Adalah inflasi yang ditimbulkan karena adanya permintaan barang konsumsi untuk masyarakat terlalu kuat. Karena permintaan masyarakat bertambah, maka kurva agregat demand bergeser dari D_1 ke D_2 , akibatnya tingkat harga berubah dari H_1 ke H_2 .

Gambar 1 : Demand Pull Inflation

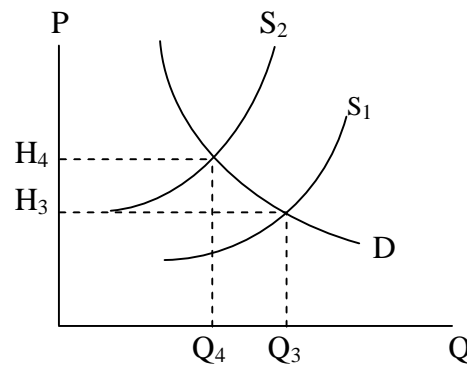


Sumber: Boediono, 2001, Ekonomi Moneter, BPFE UGM, Yogyakarta, hal 163

b. Cost Push Inflation

Adalah inflasi yang timbul karena berkurangnya penawaran agregat akibat kenaikan produksi. Dapat dilihat pada gambar 8, pada gambar tersebut terlihat bila ongkos produksi naik, maka kurva penawaran akan bergeser dari S_1 ke S_2 . Kenaikan harga barang akhir (output) mengikuti harga barang input (faktor produksi).

Gambar 2 : Cost Push Inflation



Sumber: Boediono, 2001, Ekonomi Moneter, BPFE UGM, Yogyakarta, hal 163

3. Inflasi berdasarkan asal dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation)

Inflasi yang timbul karena defisit anggaran belanja yang dibayar dengan pencetakan uang baru, panen gagal, dan sebagainya.

- b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation)

Inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau negara-negara langganan berdagang meningkat atau naik.

2.3. Kerangka Pikir

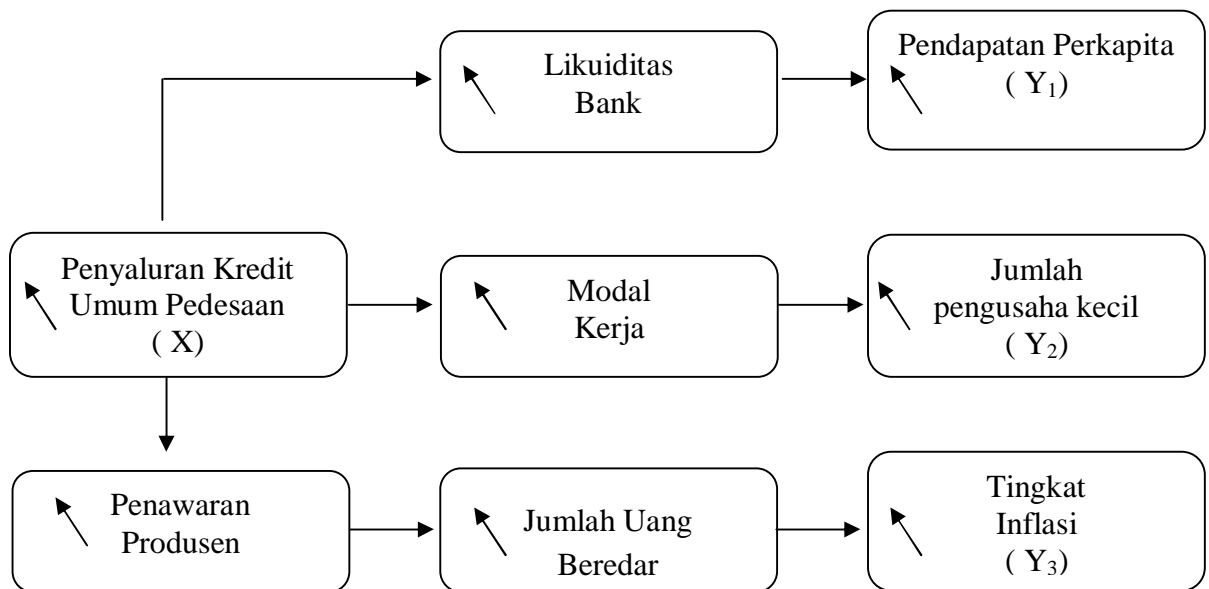
Jumlah dana simpanan dari masyarakat yang dihimpun oleh bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan sertifikat deposito berpengaruh positif terhadap penyaluran Kredit Umum Pedesaan. Karena makin banyaknya dana simpanan yang dihimpun maka likuiditas bank akan meningkat sehingga semakin banyak kredit yang disalurkan kepada pengusaha kecil. Sebaliknya makin sedikit dana simpanan yang berhasil dihimpun bank maka likuiditas bank semakin menurun sehingga kredit yang diberikan bank kepada pengusaha kecil juga semakin sedikit, karena bank mempunyai fungsi sebagai alat penyedot dana yang ada di dalam masyarakat untuk disimpan dalam bank dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Peningkatan jumlah dana simpanan dari masyarakat akan dapat meningkatkan kemampuan bank untuk memberikan fasilitas kredit. Boediono(1990:115).

Jumlah pengusaha kecil berpengaruh positif terhadap jumlah penyaluran kredit. Apabila jumlah pengusaha kecil meningkat maka permintaan modal kerja juga akan meningkat, sehingga jumlah kredit yang disalurkan akan meningkat pula. Glendoh (2001:3)

Tingkat inflasi berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit karena dengan meningkatnya tingkat inflasi harga juga akan mengalami kenaikan, dengan adanya kenaikan harga maka penawaran produsen juga akan

mengalami kenaikan sehingga penyaluran kredit juga akan mengalami peningkatan. Boediono (2001:161)

Gambar 1. Kerangka pikir



Sumber : Penulis

2.4. Hipotesis

Setelah mengalami serta berusaha untuk mendalami maka didapat suatu dugaan atau pendapat sementara, yaitu :

Diduga bahwa Penyaluran Kredit Umum Pedesaan berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita, Jumlah Pengusaha Kecil, dan Tingkat Inflasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi Operasional adalah pernyataan tentang batasan dan penjelasan secara operasional terhadap beberapa variabel yang diamati. Definisi operasional dalam hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan atau menerangkan variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian berdasarkan teori-teori yang ada, maupun pengalaman-pengalaman empiris.

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Variabel X, adalah penyaluran kredit umum pedesaan(X)

Adalah jumlah pinjaman yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia dalam bentuk modal kerja yang ditujukan bagi para pengusaha kecil. Jumlah penyaluran kredit dihitung dalam satuan Rupiah (Rp).

- b. Variabel Y, adalah pendapatan per kapita (Y_1)

Pendapatan perkapita yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia diperoleh dari berbagai pendapatan dari program yang dimiliki, seperti berasal dari tabungan, deposito, dan pinjaman dari para nasabah.

- c. Jumlah Pengusaha kecil (Y_2)

Adalah banyaknya pengusaha kecil yang membutuhkan fasilitas KUPEDes guna tambahan modal untuk usahanya. Variabel ini dinyatakan dalam satuan jiwa (Jiwa)

d. Tingkat Inflasi (Y_3)

Adalah keadaan dimana terjadi kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Variabel ini dinyatakan dalam persentase (%).

3.2. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data berkala (time series), yang dinyatakan dalam periode berkala Tahunan, sejak tahun 2002 sampai tahun 2011.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Jenis data berupa data sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan dari instansi yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dalam hal ini adalah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang dan Badan Pusat Statistik.

b. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Library Research atau studi kepustakaan

Data yang diperoleh dengan membaca buku-buku majalah serta tulisan, laporan-laporan yang berkaitan dengan judul ini.

2. Studi Lapangan

Memperoleh data dan melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini.

3.4. Teknik Anafisis dan Uji Hipotesis

3.4.1. Teknik Analisis

Dalam menganalisa data digunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Sesuai dengan tujuan dari hipotesis yang diajukan, maka kaitan antara variabel penelitian dapat digambarkan secara spesifik ke dalam model analisis regresi linier berganda, yang bentuk persamaannya sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 Y_{2i} + \beta_3 Y_{3i} + U_i \dots \dots \dots (\text{Sudrajat, 1988:79}).$$

Dimana

X_1 = Penyaluran Kapedes, dalam satuan Rupiah (Rp)

Y_1 = Pendapatan per kapita, dalam satuan Rupiah (Rp)

Y_2 = Jumlah pengusaha kecil, dalam satuan jiwa (Jiwa) .

Y_3 = Tingkat Inflasi, dalam satuan presentase (%)

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi

U_i = Variabel pengganggu

i = Pengamatan

Selanjutnya untuk mengetahui apakah model analisis regresi linier berganda tersebut di atas layak dipergunakan dalam pembuktian sena untuk mengetahui variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat maka perlu untuk mengetahui R^2 (Koefisien Determinasi) dengan menggunakan rumus :

$$R^2 = \frac{JK \text{ Regresi}}{JK \text{ Total}} \dots \dots \dots (\text{Sudrajat, 1988: 120})$$

Dimana:

R^2 = Koefisien Determinasi

JK = Jumlah Kuadrat

$$JK \text{ Regresi} = \sum_1 Y_1 X_1 + \sum_2 Y_2 X_2 + \sum_3 Y_3 X_3 + \dots \dots \sum_n Y_n X_n$$

$$JK \text{ Total} = \sum Y_1^2 \text{ atau } \frac{\sum Y_1 - (\sum Y)^2}{n}$$

Jadi :

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum Y_1 X_1 + \beta_2 \sum Y_2 X_2 + \beta_3 \sum Y_3 X_3}{\sum Y_1^2} \dots \dots \dots$$

(Sudrajat. 1988 : 84)

Karakteristik utama dari R^2 adalah :

- a. Tidak mempunyai nilai negatif
- b. Nilainya R^2 antara 0 dan 1 atau $0 \leq R^2 \leq 1$

3.4.2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan uji statistik yang terdiri dari:

a. Uji t

Adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial atau individu atau secara terpisah terhadap variabel terikat, dengan kriteria sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh)

Dimana :

$$T_{hit} = \frac{\beta_1}{SE(\beta_1)} \dots \dots \dots (\text{Gujarati, 1988 : 114})$$

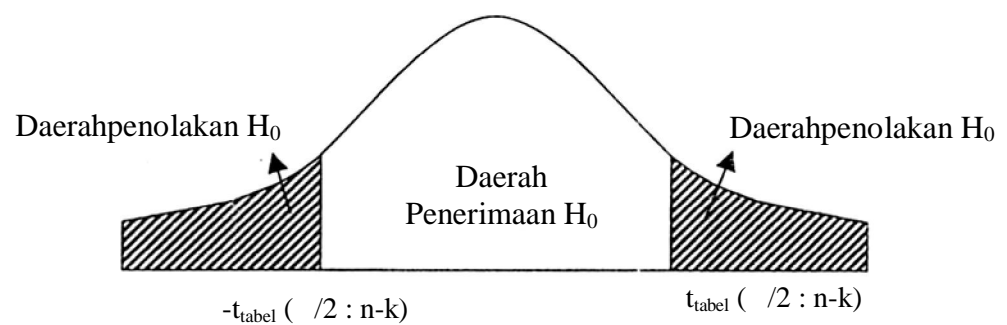
Daerah penolakan H_0

β_1 = koefisien regresi SE = standart error k = jumlah parameter
 n = jumlah sampel

Kaidah pengujiannya :

- Jika $t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti tidak ada pengaruh nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti ada pengaruh nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Gambar 3. Uji t



Sumber : Gujarati Damodar, 1993, Ekonometrika Dasar, Cetakan Ketiga, PT. Gelora Aksara Pratama, Yogyakarta. hal 79.